

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Proses Collaborative Governane dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

Proses kolaboratif untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Purworejo melalui Collaborative Governance dijalankan melalui serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi *face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes*. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi melibatkan berbagai pihak dengan tujuan bersama. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo berperan sebagai aktor utama dalam menangani masalah stunting. Oleh karena itu, mereka yang memimpin sektor tersebut bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh pihak yang terlibat, termasuk BAPPEDA Purworejo.

- a. Pada tahapan dialog tatap muka, tahapan inilah yang memiliki pengaruh dalam proses kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo. Karena dengan adanya pertemuan baik formal ataupun non formal dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan untuk memahami tujuan yang ingin dicapai. Tahapan *face to face dialogue* dalam proses kolaborasi ini sudah dilaksanakan dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan 3-4 kali dalam satu tahun. Namun, keterlibatan *stakeholders* dalam proses kolaborasi tidak disertai dengan waktu yang terjadwalkan dengan kata lain belum adanya ruang komunikasi yang berkelanjutan.

- b. Dalam membangun kepercayaan pada kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo sudah adanya usaha-usaha dari setiap *stakeholders*. Tahapan ini, memiliki peran yang berpengaruh. Pada tahapan ini setiap *stakeholders* dituntut untuk dapat bertanggungjawab dalam upaya pembangunan citra stunting di Kabupaten Purworejo agar lebih baik lagi. Namun, dalam tahapan proses kolaborasi ini masih diperlukan keterbukaan informasi yang bisa dijangkau semua pihak termasuk masyarakat umum.
- c. Pada tahapan komitmen terhadap proses kolaborasi penurunan stunting sudah berjalan baik dengan keterlibatan setiap pemangku kepentingan yang menjalankan peran sesuai dengan tupoksinya. Tahapan ini memiliki pengaruh dalam proses kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo karena apabila tidak adanya komitmen dari pemangku kepentingan maka program penanganan stunting tidak akan berjalan maksimal.
- d. Pemahaman bersama pada tahapan proses kolaborasi, masih terdapat tujuan dan nilai yang belum dipahami oleh pemangku kepentingan. Sehingga dalam hal ini memerlukan komunikasi dan koordinasi yang konsisten untuk mencapai kesepakatan akan tujuan yang ingin dicapai yaitu percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.
- e. Tahapan hasil sementara pada proses kolaborasi penurunan prevalensi stunting di Purworejo sudah dapat dilihat hasilnya, yaitu

terdapatnya program dan kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat dalam upaya pengentasan stunting yang melibatkan *multistakeholders* mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Harapannya setelah adanya kolaborasi dari banyak pihak tersebut menjadikan tercapainya penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo.

4.1.2 Faktor Penghambat Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses *collaborative governance* untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purworejo, yaitu faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. Pertama, faktor budaya terbukti menjadi salah satu penghambat dalam proses kolaboratif tersebut. Budaya paternalistik dan hierarkis yang masih kuat menghambat partisipasi setara dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Sikap malu dan rendah diri di kalangan ekonomi rendah menyulitkan upaya mengumpulkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kepercayaan dan tradisi turun-temurun menimbulkan resistensi terhadap perubahan atau pendekatan baru dalam menangani stunting. Stereotip dan diskriminasi gender menghambat partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, budaya organisasi juga perlu diperhatikan dalam setiap perencanaan program yang didukung dengan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kedua, faktor institusi juga menjadi penghambat dalam proses *collaborative governance*. Koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah

dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia menyulitkan pelaksanaan kolaborasi yang efektif. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah menghambat upaya kolaborasi yang berkelanjutan.

Ketiga, faktor politik turut menjadi penghambat dalam proses ini. Kurangnya komitmen dan dukungan politik dari pemimpin daerah dapat menghambat prioritas dan alokasi sumber daya untuk program percepatan penurunan stunting. Selain itu, adanya kepentingan politik tertentu dari aktor-aktor yang terlibat berpotensi menghambat tercapainya konsensus dan tujuan bersama dalam proses kolaboratif.

4.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah diteliti, terdapat beberapa saran yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam proses collaborative governance dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo :

1. Pastikan terdapat koordinasi yang kuat antara lintas sektor, non pemerintah, dan masyarakat. Kemudian diperlukannya dorongan untuk mengadakan pertemuan rutin antardinas sebagai upaya berbagi informasi, menyatukan visi, dan menentukan strategi bersama.
2. Bersama-sama, susunlah rencana aksi terpadu yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penurunan stunting, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana ini harus mencakup target yang jelas, strategi intervensi, serta alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai.

3. Dalam proses kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Purworejo diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat. Inovasi yang dibuat harus didasarkan pada kondisi terkini dengan tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan antar *stakeholders* terhadap pelaksanaan kolaborasi itu sendiri, karena dalam kolaborasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting tentunya setiap *stakeholders* memiliki inovasi yang berbeda.
4. Libatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan dapat membantu mempromosikan perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.
5. Memasifkan keterlibatan swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Gunakan pendekatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka. Pastikan ada koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya untuk mendukung implementasi program yang sesuai dengan budaya organisasi.